

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

Abdurrachman, Hamidah, Nugraha, Rahmad Agung dan Majestya, Nayla, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tegal: Deepublish.

Arief, Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana.

Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-PokoK Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.

Atmadja, I Dewa Gede, 2010, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Malang: Setara Press.

Azhary, Tahir, 2000, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.

Baharuddin dan Moh Yamin, 1987, *Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, Bandung: Alumni.

Ekaputra, Mohammad dan Khair, Abul, 2010, *Sistim Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press.

Fanani, Ahmad Zaenal, 2014, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)*, Bandung: Mandar Maju.

Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansya dan Nusamedia.

Gunawan, Yopi dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: PT. Refika Aditama.

- Hartati, Eni, 2001, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2006, *Peremberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harkisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Masriani, Yulies Tiena, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Lubis, Zul Pahmi, Iwan, Faury, Ahmad, 2015, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana.
- Noor, H.A Rasyid, 2009, *Korupsi dan Pemberantasnya di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan.
- Panggabean, H.P., 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Prayudi, Guse, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Purnama, I Ketut Adi, 2011, *Transparansi Penyidikan dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Untuk Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri*, Disertasi, Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.
- Ridwal H. R, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.

Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga.

Sianturi, S.R. dan Kanter, E.Y, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Stora Grafika.

Shadily, Hassan, 1983, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Supramono, Gatot, 1953, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Jakarta: Djambatan.

Surnarso, H. Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sugiarto, Umar Said, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Sinar Grafika.

Utrecht, E, 1961, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Buku Ichtisar.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru.

## **B. Perundang – Undangan**

- Kitab Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pendoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

## **C. Lampiran**

Adern Faradila, 2016, *PENGERTIAN TINDAK PIDANA, PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, DISPARITAS PUTUSAN HAKIM, PEDOMAN PEMIDANAAN, KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH), DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME*” Serial online November (Ceted 11 November 2020) available from: <http://repository.unpas.ac.id/9594/2/9.%20BAB%20I.pdf>

“FAQ”, Transparency International, dalam [http://www.transparency.org/news\\_room/faq/corruption\\_faq](http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq)

<https://learninghub.id/pakar-hukum-atasi-disparitas-pemidanaan-korupsi-butuh-revisi-uu-tipikor-dan-rkuhp/>

M. Dhana S. Ginting, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi analisa Disparitas Dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi Di Sumatera Utara*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 24.

Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, dan Asram, 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Pekara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch Policy Paper, Jakarta, Hlm. 40.

Untuk Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019.

Untuk Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

Untuk Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pid.Sus/2019